

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN LEMBAH SEMPAGER PADA BLOK 3 DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Risma Ayu Andini, LL Suhirsan Masrilurrahman

Program Studi Kehutanan Universitas Pendidikan Mandalika, Jl. Pemuda No. 59A Dasan Agung, Mataram

*Email Korespondensi: Rismaayuandini.05@gmail.com

Abstract

Perception is a process to understand the environment which includes objects and symbols. This study aims to determine community perceptions of the management of the Sempager community forest (HKm) in block 3. The method used in this research is random sampling method. Primary data obtained through observation techniques, questionnaires, interviews and documentation using a questionnaire of 20 people. In this study, data were analyzed using a likert scale. Measurement of the assessment component on the likert scale includes a range of values 5 which means strongly agree, range $4 \leq 4,5$ means agree, range $3 \leq 3,5$ is in doubt, range $2 \leq 2,5$ means disagree, and range 1 means very don't agree. Based on the results of research on community perception of the management of the Sempager Valley community forest in block 3. Namely regarding community perceptions of HKm planning. The final score was (4,5), community perceptions of organizing HKm received a final score of (4,4), community perceptions of HKm implementation get the final score of (4,6) and the public's perception of HKm supervision get the final score of (4,4). In this case the community in block 3 gets a good impact. Especially from an economic perspective the key.

Keywords: perception, community, community forestry.

Abstrak

Persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungan yang meliputi objek dan simbol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) Lembah Sempager pada blok 3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode random sampling. Data primer di dapatkan melalui teknik observasi, kuisioner, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan kuisioner 20 orang. Dalam penelitian ini data dianalisis menggunakan skala likert. Pengukuran komponen penilaian pada skala likert yaitu mencakup rentang nilai 5 di artikan sangat setuju, rentang nilai $4 \leq 4,5$ diartikan setuju, rentang $3 \leq 3,5$ ragu-ragu, rentang $2 \leq 2,5$ diartikan tidak setuju, dan rentang 1 diartikan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan lembah sempager pada blok 3 yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap perencanaan HKm mendapatkan nilai akhir yaitu (4,5), persepsi masyarakat terhadap pengorganisasian HKm mendapatkan nilai akhir yaitu (4,4), persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan HKm mendapatkan nilai akhir yaitu (4,6) dan persepsi masyarakat terhadap pengawasan HKm mendapatkan nilai akhir yaitu (4,4). Dalam hal ini masyarakat pada blok 3 mendapatkan dampak yang baik terutama dari segi ekonomi.

Kata kunci: persepsi, masyarakat, hutan kemasyarakatan.

How to Cite: :Andini, R. A., Masrilurrahman, L. S. (2023) 'Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan lembah sempager pada blok 3 Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur', *Jurnal Silva Samalas: Journal of Forestry and Plant Science*, 6 (1), pp. 28-36.

Copyright© 2023, Andini & Masrilurrahman
This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu, Indonesia telah dikenal sebagai wilayah hutan yang memiliki hutan yang luas. Oleh karena itu, keanekaragaman pohon hutannya sangat tinggi. Selama ini hutan telah memberikan banyak manfaat, baik secara ekonomis, sosial maupun lingkungan. Manfaat ekonomisnya yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya (non kayu) (Mansur dan Tuheteru, 2011).

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, mengingat intensitas interaksi masyarakat sekitar hutan dengan hutan sangat tinggi di semua wilayah Indonesia (Wollenberg et al. 2004; Awang 2006; Aji et al. 2014; Ekawati et al. 2015), di samping itu petani sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah (Suyanto & Khususiyah 2006). Alasan utama masyarakat menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggal mereka adalah keterbatasan lahan garapan dan rendahnya pendapatan (Djamhuri 2008). Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sekitar hutan, pemerintah menyelenggarakan berbagai program kehutanan sosial. Kehutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan dengan dua elemen utama yaitu partisipasi lokal dan peningkatan produktivitas secara lestari (Awang 2004).

Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program hutan kemasyarakatan (HKM). Pemenhut no. 9 Tahun 2021 HKM adalah kawasan hutan yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk pemberdayaan kemasyarakatan. Petani HKM mengelola hutan negara dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. HKM dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. HKM diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi. Masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, dan sebagian yang belum dikelola namun ingin turut berpartisipasi dalam program HKM, mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok (Sepsiaji & Fuadi 2004).

Pengelolaan areal kerja HKM merupakan sistem memadukan berbagai jenis tanaman dalam satu lahan atau dikenal dengan istilah agroforestri. Menurut Mbow et al. (2014) dalam pengelolaan hasil yang kompleks ini, praktik pertanian dan pengelolaan lahan merupakan kunci bagi agroforestri berkelanjutan. Coe et al. (2014) mengemukakan tentang pilihan-pilihan dalam pengelolaan agroforestri yang harus sesuai dengan konteks ekologi dan sosial yang beragam di berbagai tempat. Hal ini didukung oleh Wulandari et al. (2014) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat di sekitar hutan dapat mengoptimalkan lahan hutan dengan menerapkan agroforestri berbasis kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti preferensi masyarakat dan adopsi pola agroforestri.

Hutan kemasyarakatan Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur adalah hutan yang dikelola oleh Kelompok HKM Desa Gunung Malang dan difasilitasi pendampingan dari pemerintah dalam hal ini oleh tenaga-tenaga penyuluh lapangan kehutanan dan bekerja sama dengan lembaga independen.

Karakteristik masyarakat pada blok 3 yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang masih belum paham mengenai hutan kemasyarakatan. Oleh karena itu penelitian ini untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) Lembah Sempager pada blok 3 desa gunung malang kecamatan pringgabaya kabupaten lombok timur.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di Hutan Kemasyarakatan pada Blok 3 Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur pada bulan April 2023 sampai bulan Mei 2023.

a. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kamera, kuisioner.

b. Rancangan Percobaan

Skala likert adalah skala yang dirancang untuk memungkinkan responden menjawab berbagai tingkatan pada objek yang diukur.

Unsur manajemen yang dijadikan acuan dalam pembuatan kuisioner yaitu antara lain:

- a. Perencanaan (*planning*) merupakan kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin tercapai.

- b. Pengorganisasi (*organisasi*) adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi atau kelompok.
- c. Pelaksanakan (*actuating*) adalah implementasi dari perencanaan dimana seluruh komponen bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

Pengawasan (*controlling*) merupakan pengendalian kegiatan dalam proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien.

Tabel 1. Skala likert

| No | Kriteria | Skor |
|----|---------------------|------|
| 1 | Sangat Setuju | 5 |
| 2 | Setuju | 4 |
| 3 | Ragu-ragu | 3 |
| 4 | Tidak Setuju | 2 |
| 5 | Sangat Tidak Setuju | 1 |

c. Cara Kerja

Terdapat 4 tahapan utama dalam penelitian ini yaitu: observasi, kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Adapapun objek yang akan diteliti adalah masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan Lembah Sempager pada blok 3 Di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.
- b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang dijawab responden, disusun secara sistematis sehingga dapat berfungsi dalam penelitian.
- c. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan tujuan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden di catat atau direkam.

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, dan lain sebagainya.

d. Analisis Data

a. Data primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan kawasan dengan responden yang terlibat langsung dalam pelestarian hutan kemasyarakatan. yang terdiri atas Karakteristik responden meliputi nama, umur, pendidikan, persepsi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari jurnal, data Desa Gunung Malang dan BKPH Rinjani Timur yang berhubungan dengan informasi tentang masyarakat yang mengelolah Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gunung Malang merupakan salah satu dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Pringgabaya dengan luas wilayah kurang lebih 4.705,22 Ha, yang terdiri dari tanah kering, lahan perkebunan, fasilitas umum dan tanah hutan yang merupakan area bagi kegiatan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hutan kemasyarakatan yang ada di desa gunung malang terbentuk pada tahun

2013 yang memiliki luas \pm 360 Ha, dengan jumlah penggarap ada 263 orang. Hutan kemasyarakatan yang ada di desa gunung malang terbagi menjadi 4 blok. Ada blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4. Kemudian pada blok 3 memiliki jumlah anggota yaitu 62 orang dengan luas wilayah \pm 132,93 H.

Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Hal yang paling mendasar dalam pemberdayaan masyarakat lokal yang ada di Desa Gunung Malang atau masyarakat sekitar Hutan Kemasyarakatan yaitu dengan membangun kerja sama antar anggota yang mengelolah HKm dengan masyarakat umum dan pemerintah setempat. Apabila masyarakat yang mengolah hutan kemasyarakatan dengan masyarakat umum dapat bekerja sama dengan baik maka hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Gunung Malang akan tetap lestari. Berdasarkan hasil analisis pada Persepsi masyarakat terhadap Hutan Kemasyarakatan Di Desa Gunung Malang di dapatkan empat indikator pertanyaan mencakup perencanaan HKm, pengorganisasian HKm, pelaksanaan HKm dan pengawasan HKm. Sampel yang diambil diharapkan dapat mewakili semua anggota yang berada di Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Malang.

Keterangan: 1. SS : Sangat Setuju 4. TS : Tidak Setuju
2. S : Setuju 5. STJ : Sangat Tidak Setuju
3. RR : Ragu-Ragu

Tabel 5. Persepsi Masyarakat Terhadap Perencanaan Hutan Kemasyarakatan

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | Nilai Rata-rata | Nilai akhir |
|----|---|---------|----|----|----|-----|-----------------|-------------|
| | | SS | S | RR | TS | STJ | | |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1 | Tanggapan masyarakat tentang perencanaan areal kerja Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4,7 |
| 2 | Tanggapan mengenai pembersihan lahan yang dikelolah oleh anggota Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4,1 |
| 3 | Pendapat tentang pembukaan wilayah HKm | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4,9 |
| 4 | Pendapat tentang adanya perencanaan sosialisasi mengenai HKm Hutan lembah sempager | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,5 |
| 5 | Tanggapan tentang perencanaan peraturan dalam penebangan di HKm lembah sempager | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 81 | 4,0 |

Berdasarkan pada tabel 5 tentang persepsi masyarakat terhadap perencanaan Hutan Kemasyarakatan menurut responden poin yang sangat tinggi atau sangat penting yaitu mengenai pembukaan wilayah Hutan Kemasyarakatan hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai 4,9. masyarakat sekitar hutan sangat antusias dengan adanya pembukaan wilayah Hutan Kemasyarakatan dikarenakan hal ini dapat membantu masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan kayu (terbatas) maupun non kayu. Sedangkan menurut responden dengan skala penilaian terendah yaitu mengenai perencanaan peraturan dalam penebangan di Hutan Kemasyarakatan beberapa responden beranggapan bahwa

dengan adanya perencanaan penebangan dapat mengontrol kuota dalam penebangan tetapi ada juga beberapa responden yang beranggapan dengan adanya perencanaan penebangan mereka tidak dapat melakukan penebangan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

Tabel 6. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengorganisasian di Hutan Kemasyarakatan

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | Nilai | Rata-rata | Nilai akhir |
|----|---|---------|----|----|----|-----|-------|-----------|-------------|
| | | SS | S | RR | TS | STJ | | | |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Tanggapan tentang masyarakat Desa Gunung Malang sebagai pengelola inti hutan kemasyarakatan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 4,4 |
| 2 | Tanggapan mengenai adanya pengamanan hutan (PAMHUT) sebagai pemantau keamanan pada areal hutan kemasyarakatan | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4,3 | |
| 3 | Apa tanggapan mengenai adanya koprasii lembah sempager pada Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | |
| 4 | tanggapan mengenai hasil hutan pada hutan kemasyarakatan sebagai bentuk penyangga kehidupan | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,4 | |
| 5 | tanggapan mengenai KPH yang ikut serta dalam proses perkembangan HKm | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 71 | 3,5 | |

Berdasarkan pada tabel 6 mengenai persepsi masyarakat terhadap pengorganisasian di Hutan Kemasyarakatan menurut responden tentang masyarakat Desa Gunung Malang sebagai pengelola inti Hutan Kemasyarakatan dan adanya koprasii lembah sempager pada Hutan Kemasyarakatan lembah sempager merupakan poin paling penting dan tertinggi. menurut pengamatan dilapangan responden beranggapan bahwa dengan adanya Hutan Kemasyarakatan Lembah Sempager dapat mengelola lahan hutan secara legal dan beraturan. Kemudian responden beranggapan bahwa perlunya keberadaan koprasii lembah sempager untuk mempermudah setiap anggota Hutan Kemasyarakatan dalam ketersediaan sarana produksi. dalam skala penilaian terendah yaitu mengenai KPH yang ikut serta dalam proses perkembangan Hutan Kemasyarakatan, menurut responden mereka memiliki anggapan bahwa tidak menjadikan KPH sebagai prioritas untuk terlibat langsung dalam

perkembangan Hutan Kemasyarakatan dikarenakan areal Hutan Kemasyarakatan sudah memiliki penanggung jawab yang akan menangani segala hal yang ada pada Hutan Kemasyarakatan.

Tabel 7. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | Nilai | Rata-rata | Nilai akhir |
|----|---|---------|----|----|----|-----|-------|-----------|-------------|
| | | SS | S | RR | TS | STJ | | | |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Bagaimana tanggapan tentang adanya hutan kemasyarakatan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 4,6 |
| 2 | Tanggapan mengenai adanya peraturan kuota penebangan di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 3 | 13 | 4 | 0 | 0 | 79 | 3,9 | |
| 3 | Pendapat tentang adanya kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4,6 | |
| 4 | Tanggapan mengenai pelaksanaan pengamanan wilayah hutan di hutan kemasyarakatan lembah sempager | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 90 | 4,5 | |
| 5 | Tanggapan tentang pemasangan batas kawasan sebagai pembatas wilayah di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | |

Berdasarkan pada tabel 7 diketahui bahwa responden memiliki skala penilaian tertinggi tentang adanya hutan kemasyarakatan dan pemasangan batas kawasan sebagai pembatas wilayah yang ada di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager hal ini dibuktikan dengan adanya anggapan dari responden untuk status pada Hutan Kemasyarakatan harus dipertahankan agar masyarakat dapat terus mengolah Hutan Kemasyarakatan dan tetap menjaga kelestarian pada hutan kemudian dengan adanya pemasangan batas kawasan responden dapat menghindari kekacauan antar sesama anggota Hutan Kemasyarakatan dari adanya sengketa tanah atau perebutan tanah. Adapun menurut responden yang tidak dijadikan sebagai prioritas dengan penilaian terendah yaitu mengenai adanya peraturan kuota penebangan di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap responden mereka beranggapan bahwa jika peraturan penebangan diberlakukan secara intens mereka tidak bisa leluasa dalam mengolah kayu yang ada di lahan mereka masing-masing.

Tabel 8. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengawasan di Hutan Kemasyarakatan

| No | Pertanyaan | Jawaban | | | | | Nilai | Rata-rata | Nilai akhir |
|----|--|---------|----|----|----|-----|-------|-----------|-------------|
| | | SS | S | RR | TS | STJ | | | |
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Tanggapan tentang adanya pengawasan pada tanaman di areal hutan kemasyarakatan | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 83 | 4,1 | 4,4 |
| 2 | Tanggapan mengenai pengawasan izin usaha pengelolaan di hutan kemasyarakatan lembah sempager | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96 | 4,8 | |
| 3 | Pendapat mengenai adanya pengawasan batas wilayah yang ada di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4,3 | |
| 4 | Tanggapan tentang adanya pengawasan dalam penebangan di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,4 | |
| 5 | Tanggapan tentang pengawasan secara langsung oleh POLHUT dalam pengelolaan lahan yang dilakukan oleh Hutan Kemasyarakatan lembah sempage | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4,4 | |

Pada tabel 8 responden menganggap bahwa pengawasan izin usaha pengelola di Hutan Kemasyarakatan lembah sempager memiliki poin tertinggi berdasarkan pengamatan di lapangan responden memiliki anggapan bahwa dengan diberlakukannya pengawasan tersebut mereka dapat mengetahui jika ada orang yang tidak termasuk dalam anggota Hutan Kemasyarakatan sehingga mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada pemerintah yang bertanggung jawab pada Hutan Kemasyarakatan dan orang yang melanggar aturan dapat di beri sanksi. Kemudian menurut responden mengenai adanya pengawasan pada tanaman hutan diareal Hutan Kemasyarakatan memiliki tingkat penilaian rendah dibuktikan dengan rata-rata hanya mencapai 4,1 responden menganggap bahwa hal ini tidak harus dijadikan prioritas dikarenakan responden menganggap mereka dapat menangani dan mengawasi secara pribadi pertumbuhan tanaman tersebut tanpa adanya pengawasan secara intens dari polisi hutan (POLHUT).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa perspsi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan pada Blok 3 Desa Gunung Malang Kecamatan

Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tergolong dalam kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aspek yaitu berdasarkan persepsi masyarakat terhadap perencanaan HKm memperoleh nilai akhir sebesar (4,5) hal ini dibuktikan dengan adanya antusias dari masyarakat dalam pembukaan wilayah hutan kemasyarakatan dan perencanaan peraturan penebangan di HKm Lembah Sempager, kemudian berdasarkan persepsi masyarakat terhadap pengorganisasian pada HKm dengan nilai akhir yaitu (4,4) hal ini juga dibuktikan dengan adanya koprasasi Lembah Sempager sebagai tempat tersedianya sarana produksi dan KPH yang ikut serta dalam proses perkembangan HKm, kemudian dari aspek persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan HKm mendapatkan nilai akhir yang paling tinggi yaitu (4,6) dibuktikan dengan adanya pembatas kawasan sebagai pembatas wilayah di HKm Lembah Sempager dan adanya peraturan kuota penenbangan di HKm Lembah Sempager dan persepsi masyarakat terhadap pengawasan HKm memperoleh nilai akhir (4,4) dibuktikan dengan adanya pengawasan izin usaha pegelolah HKm Lembah Sempager dan pengawasan pada tanaman areal HKm.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan Hutan Kemasyarakatan Desa Gunung Malang, maka dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengarahan secara intens kepada masyarakat untuk lebih menaati atau mengikuti aturan yang berlaku pada Hutan Kemasyarakatan.
2. Pemerintah setempat yang dalam hal ini bertindak sebagai pengontrol dan sebagai fasilitator, dapat memberikan petunjuk serta arahan mengenai Hutan Kemasyarakatan yang bersifat berkelanjutan, dan dapat menumbuhkan kesadaran pada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan kemasyarakatan yang ada di Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih diucapkan kepada pegawai resor pringgabaya dan anggota hutan kemasyarakatan pada blok 3 yang telah membantu dalam proses pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji GB, Suryanto J, Yulianti R, Wiranti A, Abdurrahim AY, Miranda TI. 2014. Strategi pengurangan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Pengembangan model PHBM dan HKm. Laporan Penelitian. *Pusat Penelitian Kependudukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Jakarta.
- Arief, A. 2001. Hutan dan Kehutanan. Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Awang SA. 2004. Dekonstruksi sosial forestry: Reposisi masyarakat dan keadilan lingkungan. *BIGRAF Publishing*, Yogyakarta.
- Awang SA. 2006. Sosiologi pengetahuan deforestasi. Konstruksi sosial dan perlawanan. Debut Press, Yogyakarta.
- Chaplin, J. P. 2008. Kamus Lengkap Psikologi. Jakarta: Rajagrafindo persada.
- Coe, R., Sinclair, F. L., Barrios, E. 2014. Scaling up agroforestry requires a reserch 'in' rather than 'for' development paradigm. *Current Opinion in Sustainability*. 6:73-77.
- Dewi, I.N., Andayani, W., Dan Suryanto, P. 2018. Karakteristik petani dan kontribusi hutan kemasyarakatan (HKm) terhadap pendapatan petani di Kulon Progo. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 12 (1):89-98.
- Djamhuri, TL,. 2008. Community participation in a social forestry program in central java, Indonesia: The effect of incentive structure and social capital. *Aagroforestry Systems* 74: 83-96.
- Ekawati S, Budiningsih K, Sylviani, Suryandari E, Hakim I. 2015. *Kajian tinjauan kritis pengelolaan hutan di pulau jawa. Policy Brief. Vol 9, No. 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Bogor.*

- Gibson, Et Al, 2013. Organisasi dan Manajemen, Edisi ke empat, Jakarta: Erlangga
- Hardjasoematri, 1985. *Masyarakat Sekitar Hutan Adalah Masyarakat Yang Tnggal Disekitar Hutan*. <http://www.id.com/pengertian masyarakat.com>. (Diakses 4 maret 2015).
- Kartono dan Gulo, 1987. Kamus Psikologi. Bandung: Pionir Jaya..
- Hasibuan, S. P. M. 2009. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Buku. Bumi. Aksara. Jakarta. 262 hlm.
- Musadun, 2000., Adrianto 2006. "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Prasarana Dasar Permukiman Yang Bertumpu Pada Swadaya Masyarakat di Kota Magelang" dalam Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mbow, C. Smith, P., Skole, D., Duguma, L., Bustamante, M. 2014. Achieving Mitigation and Adaptation to climate change through sustainable agroforestry practices in Africa. *Current Opinion in Environmental Sustainability*. 6;8-14.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A., Dan Banuwa, I. S. (2017). *Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja hutan kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Povinsi Lampung*. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(3):95-103.
- Rakhmat, jalaluddin, 2005. Psikologi Komunikasi. Cetakan Kedua puluh satu. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Sepsiaji D, Fuadi F. 2004. *HKm meretas jalan. Konsorsium Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (KPHKm) Kabupaten Gunung Kidul*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugihartono, dkk, 2007. *Teori tentang pengertian persepsi*. Yayasan Kanisius, Jakarta.
- Sobur.(2014). *Psikologi Umum*. Bandung: Pusaka Setia.
- Surachmad, Winarno. 2015. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik,.Bandung:Transito.
- Wangiyana, I G. A. S. (2016). 'Molecular phylogenetic analyze of fusarium from agarwood and others fusarium with different type of nutrition based on gen its 1'. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 2 (1), Pp. 1-5.
- Wollenberg E, Belcher B, Sheil D, Dewi S, Moeliono M, 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? Governance Brief. CIFOR, Bogor.
- Wulandari, C., Budiono, P., Yuwono, S.B., Hernawati, S. 2014. Adoption of Agro-forestry Patterns and Crop Systems Around Register 19 Forest Park, Lampung Province, Indonesia. *J. Manajemen Hutan Tropika* 20 (2). 86-93.